

Analisis pertumbuhan ekonomi daerah jawa dan Kalimantan ditinjau dari kebijakan fiskal

Muliati¹, Risdina Hapipah², Lestari Riski³, Andra Sulindrana⁴, Yesi Aprianti^{5*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

*Email: yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penetapan perpindahan IKN dari Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur menjadi isu strategis akan adanya harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di daerah luar Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat variabel fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan fokus wilayah pada Pulau Jawa dan Kalimantan. Peneliti menggunakan 168 kabupaten/kota pada Pulau Jawa dan Kalimantan untuk diobservasi, dengan periode waktu selama lima tahun, 2016-2020. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi panel teknik *Ordinary Least Square*. Temuan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pertumbuhan PAD dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa dan Kalimantan. Sedangkan rasio belanja langsung tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Kalimantan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Kalimantan masih ditopang oleh adanya potensi keuangan daerah, semakin tinggi peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik. Sebaliknya pengeluaran pemerintah yang juga merupakan instrument fiskal, belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi; belanja langsung; PAD; TPAK

Analysis of economic growth in Java and Kalimantan in terms of fiscal policy

Abstract

Determining the transfer of IKN from Java to Kalimantan Island, precisely in East Kalimantan Province, is a strategic issue in the hope of better economic growth in areas outside Java. The purpose of this study is to look at the fiscal and labor variables on economic growth with a regional focus on Java and Kalimantan. Researchers used 168 districts/cities on the islands of Java and Kalimantan to observe, with a period of five years, 2016-2020. Hypothesis testing is done by using the technique panel regression Ordinary Least Square. The findings in this study are that there is a significant effect between the previous year's economic growth, PAD and LFPR growth on economic growth in Java and Kalimantan. Meanwhile, the direct expenditure ratio has no effect on economic growth in the Java and Kalimantan regions. This shows that economic growth in Java and Kalimantan is still supported by the potential for regional finance, the higher the increase in PAD, the better regional economic growth will be. On the other hand, government spending, which is also a fiscal instrument, has not been able to encourage economic growth in the same period.

Keywords: *Economic growth; direct expenditure; regional original income (PAD); labor force participation rate (TPAK)*

PENDAHULUAN

Perpindahan ibu kota negara (IKN) ke luar Pulau Jawa adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk pemerataan sebaran penduduk dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa dan pemerataan ekonomi di luar jawa. Kondisi di Pulau Jawa sudah terlalu berat untuk menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, dan pusat perdagangan serta jasa yang kemudian menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Perpindahan IKN tersebut merupakan hasil analisis dan riset secara mendalam mengenai dampak dan resiko yang akan di terima dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa dalam suatu masyarakat sehingga kemakmuran masyarakat meningkat pula dalam kurun waktu yang lama (Yuniarti et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan yang di capai. Menurut teori Neo Klasik yang dikemukakan oleh Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini didasarkan pada analisis klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang jika ada penambahan atau peningkatan dari faktor-faktor produksi yang disebutkan sebelumnya. Adanya fenomena pemindahan pemerintahan IKN dari kota Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan merupakan isu tinjauan empis yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

Tabel.1 Perbandingan pertumbuhan ekonomi jawa dan kalimantan

Tabel 1. Pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi Jawa dan Kalimantan				
Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi
	Harga Konstan 2010			
	Pulau Jawa	Pulau Kalimantan	Pulau Jawa	
2011	233.503,90	192.579,81	0,288	0,167
2012	245.357,75	198.860,88	0,290	0,152
2013	257.063,89	285.477,84	0,278	0,202
2014	268.516,29	290.388,36	0,252	0,137
2015	280.419,37	288.288,97	0,248	0,062
2016	293.032,92	287.769,44	0,255	0,076
2017	306.902,12	294.691,20	0,263	0,157
2018	321.754,32	299.832,89	0,277	0,128
2019	336.812,04	308.982,28	0,047	0,031
2020	325.293,37	296.086,00	-0,034	-0,042

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata PDRB per kapita Pulau Jawa dan Kalimantan pada setiap tahunnya berdasarkan gabungan data RDRB pada masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2019 di Pulau Kalimantan menyumbang sebesar 308.982,28 ribu rupiah yang merupakan sumbangan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Pulau Jawa sendiri pendapatannya selalu meningkat secara terus menerus dan stabil dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan ekonomi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa lebih besar di banding Pulau Kalimantan. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan sendiri tidak stabil, dimana cenderung di bawah 0,2 persen. Namun pada tahun 2013, Pulau Kalimantan berada pada tingkat 0,2 persen. Namun, pada tahun 2020, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa sama-sama mengalami penurunan akibat adanya pandemic Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020. Hal ini memiliki pengaruh tidak hanya di kedua pulau namun di seluruh daerah termasuk negara lainnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat disuatu daerah. Pulau Jawa perekonomiannya terangkat yakni adanya dukungan infrastruktur, sarana dan industry dan sarana prasarana lainnya selayaknya daerah ibu kota negara. Hal ini juga berdampak pada minta penduduk untuk ditinggal, menetap, dan bekerja diwilayah IKN dengan harapannya tersediaanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Di Pulau Kalimantan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah jika di banding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,13% per tahun. Rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan,

sama halnya pulau di luar IKN lainnya adalah karena rendahnya investasi, kurangnya sarana penunjang publik, kecilnya peluang kerja dan berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita. Oleh karena itu, dengan adanya pemindahan IKN diharapkan dapat menjadi mengarah kebijakan pembangunan pada wilayah Kalimantan.

Kalimantan Timur merupakan tempat tujuan perpindahan IKN baru Indonesia yang telah di umumkan oleh presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang di sebutkan sebelumnya. Yakni resiko bencana yang minim, kawasan nya juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang seperti Kota Balikpapan dan Samarinda yang kemudian di proyeksikan akan dapat menumbuhkan berbagai sektor di Kalimantan Timur. Serta adanya penggunaan sumber daya potensial di Kalimantan Timur yang selama ini belum termanfaatkan. Kondisi ekonomi di Kalimantan Timur periode 2011-2020, secara umum pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi. Dimana, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 0,026 persen dan mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012 menjadi 0,027 persen. Pada tahun 2013 terjadi sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu menjadi 0,075 persen. Namun, di tahun 2014-2016 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2017-2019 mengalami sedikit peningkatan (BPS). Adapun struktur perekonomian Kalimantan Timur dari sisi lapangan usaha di dominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan konstruksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran Rumah Tangga menjadi komponen yang mendominasi struktur perekonomian di Kalimantan Timur.

Pemerintah dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan. Menurut Keynes (Nopirin, 2000), kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang digunakan untuk memperbaiki perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua: kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan dengan jalan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.

Realisasi kegiatan pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan bagi pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi dari APBD yang merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian di daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini sejalan dengan pemikiran Keynes (Sukirno, 2006) yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah dalam membangun daerahnya akan meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Chamdani, 2019). Pada bagian pengeluaran (belanja) yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang melekat langsung pada program pemerintah dan belanja pelayanan belanja publik. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menggunakan rasio belanja langsung sebagai variabel kunci penelitian. APBD akan di kelola oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dan memberdayakan potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka peneliti juga meneliti potensi pendapatan asli daerah yaitu merupakan proyeksi modal untuk digunakan sebagai oprasional dan dapat menyerap tenaga kerja yang merupakan faktor pendorong perekonomian daerah.

Belanja langsung atau di kenal dengan belanja pembangunan merupakan salah satu pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif dan berkaitan langsung oleh kepentingan publik akan mendorong meningkatnya perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan membantu pembangunan daerah yang kemudian akan menarik investor dan membuka lapangan pekerjaan. Data yang dikumpulkan dari BPS menunjukan bahwa alokasi belanja langsung tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari Rp6.108.774.595.844 menjadi Rp461.108.103.449. Namun pada tahun 2015, belanja langsung mengalami kenaikan. Dan dari tahun 2015-2020 ini alokasi belanja

langsung cukup fluktuatif atau terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang cenderung turun dalam beberapa tahun dan sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah yang mengatakan bahwa belanja daerah dalam APBD memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui alokasi belanjanya.

Selain pengeluaran pemerintah, tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia dan merupakan salah satu faktor produksi yang di sebutkan dalam teori Neo Klasik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tenaga kerja merupakan angkatan kerja yang berusia dewasa yang mendapatkan pekerjaan dan sedang bekerja yang kemudian akan menghasilkan output. Jika tenaga kerja meningkat, maka terjadi peningkatan output per orang yang dipekerjakan atau disebut produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama naiknya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja, baik pekerja ahli maupun pekerja kasar yang di tunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya. Salah satu indikator yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sering digunakan untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan banyaknya keikutsertaan masyarakat dalam menjelaskan tentang penduduk yang mampu melakukan kegiatan produksi (Mankiw, 2013).

Adapun jumlah penduduk Kalimantan Timur tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan di mana dari tahun 2018-2019 jumlah penduduk usia kerja meningkat sekitar 2,49 persen. Dengan rincian penduduk usia kerja laki-laki meningkat sekitar 2,41 persen dan perempuan meningkat sebesar 2,58 persen. peningkatan penduduk usia kerja ini diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sekitar 4,78 persen. hal ini juga terlihat dari peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Dari 64,99 persen di tahun 2018 menjadi 66,44 persen di tahun 2019. Yang mana TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan. Jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia akan menjadi beban perekonomian daerah. Sehingga pemerintah harus dapat memberi solusi terhadap pengangguran tersebut. semakin banyak penyerapan tenaga kerja maka akan mengurangi pengangguran, yang mana dapat menambah peningkatan output. Sehingga nilai produktivitas meningkat dan tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Jika dikaitkan tenaga kerja dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal belanja langsung seharusnya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Karena seperti yang di jelaskan sebelumnya, belanja langsung merupakan belanja di alokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana dan infrastruktur yang akan mendorong dan mengoptimalkan fungsi-fungsi keuangan berbagai sektor lapangan usaha. Sektor-sektor inilah yang kemudian akan menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah (Bone Adisaputra, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif pada data-data sekunder dengan *series* data tahun 2016-2020, dan meliputi 168 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa dan Kalimantan. Untuk variabel yang bersumber dari APBD, kami menggunakan data publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sedangkan data tenaga kerja dan PDRB bersumber dari Badan Pusat Statistik. Total observasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah 840 observasi.

Data panel yang digunakan adalah data yang merupakan penggabungan pada data bertipe *cross-section* dan *time series* (Gujarati, 2007) dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan pada fenomena pertumbuhan ekonomi, kami mengasumsikan pertumbuhan ekonomi sebagai output dari proses produksi sehingga besarnya akan dipengaruhi oleh input modal dan tenaga kerja. Modal adalah diproyeksikan oleh adanya dana yang bersumber dari kebijakan fiskal, baik sisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Sedangkan tenaga kerja diproyeksikan oleh TPAK. Oleh sebab itu, model panel yang kami bentuk adalah:

$$y_{i,t} = \alpha + \delta y_{i,t-1} + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

dengan i bernilai 1, 2, ..., n dan t bernilai 1, 2, ..., t di mana:

$y_{i,t}$	= pengamatan variabel pertumbuhan ekonomi antar wilayah (i) dan periode (t)
α	= konstanta
δ	= koefisien kelembaman variabel dependen
$x_{i,t}$	= observasi variabel-variabel bebas
β	= parameter koefisien variabel bebas
$\varepsilon_{i,t}$	= <i>error term</i>

Pada persamaan (1) tersebut, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan data pertumbuhan produk domestik domestik bruto (PDRB). Selanjutnya kami mengobservasi variabel bebas yaitu: pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pertumbuhan PAD, rasio belanja langsung dan TPAK. Kemudian model panel pada data panel ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS) dengan teknik *common effect model* untuk analisis regresi data panel. Lebih lanjut, perhitungan data pertumbuhan dan rasio dalam model kami menggunakan formulasi berikut:

$$\text{Pertumbuhan: } x = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \quad (2)$$

$$\text{Rasio : } X = x / \text{total } x \quad (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah terjadi stasioneritas dengan menggunakan uji stasioneritas Augmented Dickey Fuller pada masing-masing variabel penelitian dengan hasil seluruh variabel stasioner pada level. Berdasarkan hasil tersebut maka alat analisis yang tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kuadrat terkecil (OLS). Terdapat tiga pendekatan dalam model data panel yaitu: 1) Pendekatan kuadrat terkecil, juga dikenal sebagai *pooled least square* atau *common effect model* (CEM); 2) Pendekatan efek acak atau *fixed effect model* (FEM). Metode ini juga dikenal dengan sebutan *Least Square Dummy Variable* (LSDV); dan 3) Pendekatan efek atau *random effect model* (REM). Penentuan regresi data panel dengan salah satu dari tiga pendekatan tersebut dilakukan dengan uji tertentu yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menentukan antara pendekatan CEM dan FEM, sedangkan uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah kami akan menggunakan pendekatan FEM atau REM. Secara umum uji Chow digunakan untuk melihat signifikansi antara CEM dan FEM dengan H_0 tidak terdapat perbedaan koefisien pada dua model yang ingin diuji, dan H_1 terdapat perbedaan koefisien antara dua model yang ingin diuji, atau dengan kata lain H_0 adalah CEM dan H_1 adalah FEM. Jika nilai *p value* dari uji ini lebih kecil dari alpha maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih adalah pendekatan *fixed effect*, demikian pula sebaliknya jika H_0 diterima maka pendekatan yang disarankan adalah pendekatan CEM. Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan apakah nilai error individu berkorelasi dengan koefisien variabel independen dengan H_0 tidak terdapat korelasi antara nilai error individu dengan koefisien regresi variabel independen. Dengan kata lain H_0 adalah REM dan H_1 adalah FEM dimana H_0 ditolak jika nilai signifikansi *p value* lebih kecil dari nilai alpha.

Sebelum melanjutkan analisis data, kami melakukan pengujian terhadap kelayakan data. Kami menggunakan data panel, yaitu melakukan observasi dengan menggabungkan data dari kabupaten/kota pada Pulau Jawa dan Kalimantan. Pengujian multikolinieritas tetap kami lakukan pada jenis data ini, karena pengujian bersifat melihat derajat hubungan antar variabel. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk terdapat korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikorlinear pada penelitian.

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 diatas, dapat disimpulkan apabila $VIF > 10$ dan $1/VIF > 0,1$, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas. Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa Rasio belanja langsung < 10 (1.11), TPAK < 10 (1.06), $PE_{t-1} < 10$ (1.00), dan Pertumbuhan PAD < 10 (1.00), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak ada pengaruh antara hubungan independen. Hasil ini mengindikasikan penggunaan variabel independent dapat digunakan dalam satu model persamaan regresi.

Tabel 1. Uji multikolineritas

Variabel	VIF	1/VIF
Rasio Belanja Langsung	1.11	0.903468
TPAK	1.06	0.943976
PE _{t-1}	1.00	0.996626
Pertumbuhan PAD	1.00	0.998978
Mean VIF	1.06	

Pengujian selanjutnya dilakukan dengan melihat normalitas data. Pengujian normalitas data, layak dilakukan pada data dengan runtun waktu. Menurut Basuki dan Yuliadi (2014) uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Skewness/Kurtosis test, dengan hasil sebagai pada Tabel 2.

Hasil pengujian normalitas, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu variabel berdistribusi normal yaitu TPAK, sedangkan tidak berlaku untuk variabel lainnya. Hal ini dapat dilihat dari variable Rasio belanja langsung memiliki nilai Pr (Skewness) sebesar 0.0000 dan Pr (Kurtosis) sebesar 0.8746 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi, 0.0000 lebih kecil dibandingkan 0,005 ($0.00 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Rasio Belanja rutin berdasarkan uji Skewness Kurtosis, residunya dinyatakan tidak berdistribusi normal. Kemudian pada variable PE_{t-1}, Pertumbuhan PAD, dan PE sama-sama memiliki nilai Pr (Skewness) sebesar 0.0000 dan Pr (Kurtosis) sebesar 0,0000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti variable-variable tersebut tidak berdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas pada table 2 menunjukkan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari seluruh variable, hanya terdapat satu variable pada Probabilitas yaitu TPAK yang lebih dari 0,05 ($> 0,5$) yang memiliki data berdistribusi normal. Selanjutnya variabel TPAK memiliki nilai Pr (Skewnes) sebesar 0.0299 dan Pr (Kurtosis) sebesar 0.3613 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0630, berarti nilai signifikansi lebih besar dibandingkan 0,005 ($0,0630 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan pada variable TPAK memiliki data yang berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji normalitas (skewness/kurtosis tests for normality)

Variabel	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	Prob>chi2
Rasio Belanja Langsung	0.0000	0.8746	32.59	0.0000
TPAK	0.0299	0.3613	5.53	0.0630
PE _{t-1}	0.0000	0.0000	.	.
Pertumbuhan PAD	0.0000	0.0000	.	0.0000
PE	0.0000	0.0000	.	.

Mengingat syarat pengujian normalitas dilakukan pada data dengan runtun waktu, sedangkan penelitian ini menggunakan data gabungan waktu/periode dan wilayah. Selanjutnya data yang terdeteksi tidak berdistribusi normal adalah data yang telah kami sesuaikan satuannya kedalam bentuk rasio. Maka penelitian dengan data tersebut, kami lanjutkan untuk dianalisis hasilnya. Untuk pengujian autokorelasi yaitu menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), tidak kami lakukan dengan asumsi data yang kami gunakan sudah bersifat stasioner dengan adanya tahapan *first difference* pada data.

Pengujian selanjutnya adalah memutuskan model terbaik dalam data panel. Kami menggunakan uji Chow yang secara umum dimaksudkan untuk menguji apakah model yang digunakan adalah common effect (CEM) atau FEM dengan H_0 tidak terdapat perbedaan koefisien pada dua model yang ingin diuji, dan H_1 terdapat perbedaan koefisien antara dua model yang ingin diuji. Pada stata uji Chow tidak secara spesifik dibentuk melalui syntax tertentu, namun secara implisit dapat dilihat uji F yang memiliki fungsi yang sama. Berdasarkan uji F yang diperoleh pada model regresi dengan model efek tetap diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan koefisien pada model CEM dan FEM (lihat lampiran). Meskipun demikian meskipun model yang terpilih adalah pendekatan CEM dan uji lanjutan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan penggunaan pendekatan REM menjadi tidak relevan, atas dasar keinginan tahuan hasil regresi untuk model REM dan uji Hausman tetap dapat dilihat pada lampiran.

Hasil regresi dengan pendekatan CEM pada tabel. 3 menunjukkan bahwa terdapat kelayakan model dengan adanya nilai signifikansi (Uji F) sebesar 0.000 pada sejumlah 840 observasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel rasio belanja langsung, pertumbuhan PAD, TPAK dan pertumbuhan

ekonomi pada periode sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, walaupun dengan nilai koefisien determinasi yang relatif kecil

Analisis terhadap pengaruh masing-masing variabel dilanjutkan dengan melihat nilai signifikansi dan koefisien masing-masing variabel. Nilai dari t-statistik dari rasio belanja langsung sebesar 0.27 yang berarti menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak signifikan. Selanjutnya hasil yang kami peroleh menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan PAD, TPAK dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD memiliki nilai t-statistik sebesar 1.65 dengan level signifikan $p < 0.1$, begitupula dengan TPAK yang signifikan di level 10% dengan nilai t-statistik -1.88. Sedangkan pada variabel PE_{t-1} yang memiliki $p < 0.01$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada observasi yang kami lakukan tidak ditemukan bukti empiris pengaruh rasio belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja langsung adalah variabel yang dihitung dengan melihat kontribusi realisasi belanja langsung dengan total belanja yang dilakukan pemerintah daerah pada satu periode anggaran.

Tabel 3. Hasil penelitian

Variabel	CEM
Rasio Belanja langsung	.0830388 (.3060504) [0.27]
Pertumbuhan PAD	.1561407* (.0946288) [1.65]
TPAK	-.0112115* (.0059616) [-1.88]
PE_{t-1}	-.1267653** (.0338701) [-3.74]
Cons	.8284498 (.4582796) [1.81]
Number of obs	= 840
R^2	= 0.0241
F(4,835)	= 5.16
Prob > F	= 0.0004

legend:

* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$;

() standar error variabel

regressor,

[] t statistik untuk CEM

Dari sisi pengeluaran, terlihat bahwa rasio belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,0830388. Di mana apabila pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,0830388 persen. Koefisien tersebut relatif rendah jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hal ini tidak signifikan atau tidak dapat dibuktikan secara statistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri (2016), yang menemukan bahwa belanja modal (yang merupakan komponen belanja langsung) provinsi-provinsi di Sumatera pada tahun 2009-2013 berpengaruh positif namun tidak signifikan pula. Selanjutnya terdapat penelitian (Fitri Bahari dan Nugroho, 2019) dengan menggunakan panel data di wilayah Jawa tengah, menemukan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya temuan empiris bahwa tidak signifikannya pengaruh rasio belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Kalimantan menunjukkan bahwa belanja langsung yang dilakukan pemerintah kurang tepat, sehingga belum mampu mendorong peningkatan produksi terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sebagaimana diketahui bahwa belanja langsung adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan penggunaannya untuk program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk didalamnya untuk pembayaran gaji pegawai, belanja aset dalam bentuk barang dan juga jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk pembelian dan pembangunan kebutuhan pemerintah daerah dan juga penyediaan fasilitas publik. Kami tidak dapat melakukan pengecekan data, apakah kontribusi realisasi penggunaan belanja langsung lebih besar ke belanja produktif ataupun belanja non produktif (tidak memiliki hubungan langsung dengan pembangunan ekonomi) dikarenakan

akses terhadap data keuangan yang relatif terbatas. Ditambah, alokasi belanja langsung atau belanja pembangunan seperti infrastruktur, sarana/prasarana tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga untuk manfaat jangka pendek belum terasa dan bahkan dapat mengganggu kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan koefisien sebesar 0.1561407 menyatakan setiap peningkatan PAD 1% terhadap jumlah tahun sebelumnya, maka dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0.1561407%. Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Defia Riski Anggarini (2018) dan Khairul Amri (2020) di Indonesia yang menyajikan bukti empiris bahwa pendapatan dan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan lingkup penelitian di Sumatera Utara (Saraswati, 2018) juga menemukan pengaruh positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya dampak positif pada pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah mengindikasikan oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak daerah juga semakin baik. Sehingga kenaikan dalam penerimaan pajak daerah berhubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan dapat dilihat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah bersifat dua arah (*bidirectional causality*), adanya penerimaan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada variabel pendapatan asli daerah yang dihitung berdasarkan data pertumbuhannya pada tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan potensi daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Komponen variabel fiskal yang utama adalah pajak. Pajak merupakan salah satu indikator pembentuk PAD, selain retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang perhitungannya dipisahkan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diindikasikan pentingnya peningkatan PAD untuk meningkatkan perekonomian daerah. Semakin tinggi peningkatan PAD yang diterima daerah, akan semakin baik pula perekonomian suatu daerah. Peningkatan potensi daerah dapat dilakukan pemerintah daerah dengan cara peningkatan aktifitas dan/atau perluasan usaha pada hotel, restoran dan rumah makan, sektor pariwisata (hiburan, reklame, parkir), serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah.

Dilihat juga dilihat pada Tabel 3 bahwa variable Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada derajat 10% terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana apabila TPAK meningkat 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0112115 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa adanya fenomena jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan di Pulau Jawa dan Kalimantan akan menjadi beban perekonomian daerah. Sehingga, apabila Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat namun tidak bersamaan dengan lapangan pekerjaannya tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sendiri merupakan orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tetapi dalam kasus penelitian ini yakni Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan jumlah penduduknya terus meningkat baik penduduk usia kerja maupun usia tidak produktif. Dalam penelitian ini, kami belum melakukan pengukuran terhadap kualitas pekerja di Indonesia. Dengan temuan tersebut dapat diindikasikan bahwa tenaga kerja di Indonesia sebagian cenderung masuk pada golongan tenaga kerja takterdidik. Dimana jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan wajib belajar. Untuk lapangan pekerjaan sendiri pun belum memadai yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi dan tentunya akan menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pada nilai TPAK memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Penelitian ini sejalan dengan teori Neo Klasik oleh Solow- Swan (Laksono et al., 2016) yang mana pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi salah satunya tenaga kerja. Yang mana, TPAK tinggi tidak memberikan keuntungan jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Aisyah Safitri dan Ariusni (2019), berdasarkan hasil penelitiannya, TPAK berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dengan indikasi bahwa Pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga meningkatnya TPAK tidak memberi keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, dalam penelitian ini kami juga melakukan pengukuran terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi

tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan yang sekarang. Hal ini karena, pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya mengalami fluktuasi dan bernilai positif dengan kecenderungan pertumbuhan yang relatif kecil. Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis karena adanya *pandemic covid-19* sehingga produksi barang dan jasa mengalami penurunan yang drastis pula. Hal tersebut juga diikuti dengan penurunan kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Namun secara lebih lanjut, kami belum melakukan pengujian terhadap hal ini. Perekonomian akan mengalami peningkatan pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan jasa tahun sebelumnya lebih kecil dibanding tahun tertentu, pengukuran ini pada level daerah dilakukan terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pada sumbangan dari berbagai sektor perekonomian di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pada Pulau Jawa dan Kalimantan, menunjukkan pendapatan asli daerah yang mempunyai peran dominan walaupun daerah belum seutuhnya mengoptimalkan potensi daerah untuk menciptakan penerimaan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang masih berada dikisaran 20% untuk periode fiskal 2016-2020. Keuangan pemerintah daerah masih ditopang dengan adanya transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk bagi hasil maupun dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan digunakan daerah untuk pelaksanaan operasional dan program kerja. Peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah mampu dipengaruhi oleh pendapatan walaupun dengan modal penergrakan perekonomian daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Dan Kalimantan yang berfluktuatif setiap tahunnya setelah pelaksanaan kebijakan fiskal, namun di sisi lain terjadi ketimpangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di setiap provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan serta adanya variabel lain seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten/kota. Namun Penelitian Kusuma Wijaya (2019) dengan temuan yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Wewenang daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom sudah diatur secara tegas, disebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. Namun sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah, selama periode tersebut, terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional.

SIMPULAN

Observasi yang kami lakukan pada lingkup kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Kalimantan menunjukan bahwa variabel fiskal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah, sedangkan rasio belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa peran penting pemerintah daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan yang bersumber dari peningkatan potensi dan aktifitas daerah. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum bersifat peningkatan produktifitas daerah yang dapat diukur pengaruhnya pada tahun yang sama. Tujuan akhir dari kebijakan fiskal yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan untuk variabel TPAK yang memproyeksikan peran tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi juga tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan.

Temuan tersebut menjadi dasar rekomendasi kami untuk melakukan pengecekan terhadap peran dana perimbangan dan rasio angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya dana perimbangan dan penyerapan tenaga kerja dapat menjadi variabel pembentuk atas peningkatan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. Produk Domestik Bruto Regional Menurut Atas Dasar Harga Konstan 2020. <https://www.bps.go.id/indicator/52/288/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita.html> (Diakses pada 15 Oktober 2021, Pukul 15:43)

-
- Bone Adisaputra, U. S. (2017). *Skripsi Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Di Kawasan Danau Toba*.
- Chamdani, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008 – 2014. *Ekonomi Bisnis*, 24(1), 34–54. <https://doi.org/10.33592/jeb.v24i1.203>
- Defia Riski Anggarini. 2018. Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Technobiz : International Journal Of Business*, Vol. 1, No. 1, 2018, 1-4. E-ISSN 2655-3457
- Dwirandra,A.A.N.B. 2013 PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN KESERASIAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8 No.2, Juli2013
- Fitri Bahari & Nugroho. 2019. Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 17 Nomor 1 – Juni 2019
- Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika*.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ*, 3(1), 102–118.
- Laksono, R. T., Pengajar, S., Iesp, J., & Ekonomi, F. (2016). Efektifitas Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 189–202.
- Pustaka, K., Pemikiran, K., & Hipotesis, D. a N. (2004). *Bab II Kajian Pustaka , Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis. i*, 16–45.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sadono Sukirno. (2006). *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT.RajaGrafindo
- Saraswati, Dwi, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. Vol. 8 No.2 Januari 2018. ISSN: 2087 – 4669
- Utara, U. S. (2017). *Skripsi Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Di Kawasan Danau Toba*.
- Wijaya, K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Dan Pengangguran. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, I (1), 56-68.
- Yuniarti,P.,Wianti,W.,&Nurgaheni,N.E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomidi Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2 (3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>